

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum terdapat perbedaan antara mekanisme dan pola rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai Golkar melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dikhususkan terhadap internal partai, tetapi ada kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk memperbolehkan rekrutmen eksternal partai dengan berbagai pertimbangan dan harus disetujui oleh DPP, sedangkan Partai Hanura membuka pendaftaran bagi masyarakat umum untuk menjadi caleg. Perbedaan ini tidak terlepas dari kondisi internal partai, di mana partai Golkar sudah memiliki kader banyak yang siap dicalonkan menjadi anggota legislatif sedangkan Hanura adalah partai baru yang belum memiliki banyak kader internal potensial yang siap dicalonkan menjadi caleg. Lagipula Partai baru seperti Hanura membutuhkan figur-figur dari luar partai yang mampu menjadi penarik suara masyarakat. Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Hanura akan banyak melahirkan caleg-caleg instan. Berbeda dengan partai Golkar yang lebih mengedepankan karir politik di partai dalam perekrutannya.
2. Walaupun sudah memiliki acuan rekrutmen yang berasal dari pimpinan pusat yang sudah cukup bagus tetapi dalam praktek rekrutmen caleg DPRD Provinsi yang dilakukan DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPD Partai Hanura Jabar,

peran pimpinan partai sangat dominan. Hal ini menyebabkan seleksi terhadap bakal caleg bersifat tertutup yang memungkinkan aspek subyektifitas pimpinan bermain di dalamnya.

3. Kriteria yang ditetapkan oleh Partai Golkar maupun Hanura terdiri dari kriteria umum, yaitu kriteria yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2008, dan kriteria khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh internal partai masing-masing. Kriteria khusus yang diprioritaskan dari Partai Golkar adalah aspek pengabdian dan prestasi selama menjadi anggota maupun pengurus. Sedangkan partai Hanura tampaknya ingin sedikit melakukan *brain image* dengan mengutamakan aspek pendidikan formal sebagai salah satu aspek yang signifikan dalam proses seleksi.
4. Dalam pelaksanaannya baik Partai Golkar maupun Partai Hanura menemui berbagai kendala. Umumnya kendala yang dihadapi oleh Partai Golkar dan Hanura adalah sama yaitu terkait masalah administrasi dan kesulitan memenuhi kuota 30% perempuan. Upaya yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar adalah mengoptimalkan peran organisasi sayap mereka seperti Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG), sedangkan upaya yang dilakukan oleh Partai Hanura adalah mengoptimalkan sosialisasi pendaftaran caleg terhadap masyarakat umum dengan harapan banyak perempuan yang mendaftar.

B. Saran

1. Secara Keilmuan

Penulis harapkan ada mahasiswa atau insan akademis lain yang bisa mengembangkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dengan cara melakukan penelitian yang masih terkait rekrutmen caleg tetapi dengan partai politik yang berbeda. Bagaimanapun penulis menyadari bahwa dua partai politik saja yang dijadikan objek penelitian sangatlah kurang dari memadai untuk melihat pola rekrutmen caleg secara umum dari partai-partai politik di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Partai Golkar harus berani mempertahankan bentuk rekrutmen caleg khusus internal partai ini, apapun hasil dari pemilu 2009 nanti, dengan catatan bahwa proses rekrutmen anggota partai diperbaiki sehingga individu-individu yang potensial mau bergabung dengan menjadi anggota Partai Golkar. Selain itu, Partai Golkar pun harus menciptakan program-program riil yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tujuan meraih simpati masyarakat dan memperkenalkan orang-orang Golkar kepada masyarakat.
- b. Apabila Partai Hanura berhasil meraih *Electoral Thresold* (ET) pada pemilu 2009 maka pada rekrutmen caleg berikutnya Partai Hanura harus melakukan pengkaderan dengan baik sebagai upaya untuk mempersiapkan caleg yang berkualitas pada pemilu 2014 karena bagaimanapun proses mempersiapkan caleg dalam pemilu adalah proses yang panjang yang tidak boleh dianggap sebagai proses instan yang cukup hanya dalam satu – dua bulan.

- c. Dalam proses seleksi, baik partai Golkar, Partai Hanura, maupun partai politik lainnya harus melibatkan unsur masyarakat untuk mengawasi jalannya seleksi. Hal ini dimaksudkan supaya seleksi yang dilakukan bisa lebih transparan dan meminimalisir aspek subyektifitas pimpinan partai dalam seleksi
- d. Partai Golkar dan Hanura harus lebih memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam kepengurusan. Selain itu Partai Golkar dan Hanura pun harus mengoptimalkan organisasi sayap perempuannya untuk bisa mengembangkan potensi individu anggotanya sehingga mampu menjadi kader yang berkualitas yang siap dan berani tampil sebagai caleg pada pemilu berikutnya.
- e. Sistem pengkaderan yang harus dilakukan oleh Partai Golkar maupun Hanura haruslah berjenjang. Hal ini agar aspek tingkat kepengurusan yang menjadi salah satu aspek penilaian dalam *scoring* menunjukkan maknanya, yaitu terpilihnya orang-orang yang telah melalui tahap kaderisasi yang teruji.